

# EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS KETENAGAKERJAAN

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 diarahkan pada perwujudan pelaksanaan program yang tercantum pada Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2024.

Dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 memuat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : 1). Tersedianya Peluang Kerja Yang Didukung Oleh Kualitas Tenaga Kerja; 2). Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis Serta Kesejahteraan Tenaga Kerja; 3). Tersedianya Administrasi Pelayanan Ketenagakerjaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Transparan.

Untuk tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mendapat alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp.24.553.916.761,- (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah)

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 sebesar Rp.23.127.123.227,- (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 94,19 persen.

Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.11.534.696.861,- (sebelas milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar

- Rp.10.841.500.863,- (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) atau sebesar 93,99 persen;
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.149.040.400,- (seratus empat puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.122.217.815,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau sebesar 82,00 persen;
  3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.3.698.283.800,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.615.917.040,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat puluh rupiah) atau sebesar 97,77 persen;
  4. Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.1.803.790.600,- (satu milyar delapan ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.553.795.169,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 86,14 persen; dan
  5. Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.7.368.105.100,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus lima ribu seratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.993.692.340,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 94,92 persen.

Makassar, 20 Januari 2025  
Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Makassar

**NIELMA PALAMBA, SH. M.AP**

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. : 19651210 199112 2 006

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>01</b>
1.1 Latar Belakang .....	02
1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan .....	02
<b>BAB II. PERBANDINGAN PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA DAN RENSTRA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB III. CAPAIAN TARGET KINERJA &amp; PENYERAPAN DANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR .....</b>	<b>26</b>
3.1. Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah .....	27
3.2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	32
3.3. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	50
3.4. Evaluasi Terhadap Hasil Capaian Program Strategis RPJMD Kota Makassar .....	52
<b>BAB IV. KENDALA YANG DIHADAPI .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Progran Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 .....	08
Tabel 1.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 .....	11
Tabel 2.1	Perbandingan antara Program/Kegiatan dalam Renja Dan Renstra Dinas Ketenagakerjaan TA. 2024 .....	18
Tabel 2.2	Analisis Perbandingan Program dan Kegiatan antara Renja Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar .....	24
Tabel 3.1	Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	27
Tabel 3.2	Rata-Rata Capaian Kinerja Program Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024.....	33
Tabel 3.3	Rincian Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2024 .....	47
Tabel 3.4	Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan .....	48
Tabel 3.5	Formulir E.80 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan .....	52
Tabel 3.6	Capaian Program Strategis 10.000 Skill Training Gratis Periode 2021-2022 .....	58
Tabel 3.7	Capaian Program Strategis Penyediaan Dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru Periode 2021-2022 .....	60

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2708/050.13/Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2378/188.4.45/Tahun 2024 tentang Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2708/050.13/Tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta

dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan Evaluasi Rencana Kerja pada Tahun 2024 didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada Tahun 2024.

Sesuai dengan uraian-uraian di atas itulah pada kesempatan ini dilakukan evaluasi terhadap program kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur.

## 1.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bidang ketenagakerjaan dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dengan menjaga prinsip sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dengan mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Makassar sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Makassar.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kota Makassar Tahun 2021-2026 **“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk Semua”**, dengan 3 (tiga) misi Kota Makassar yaitu sebagai berikut :

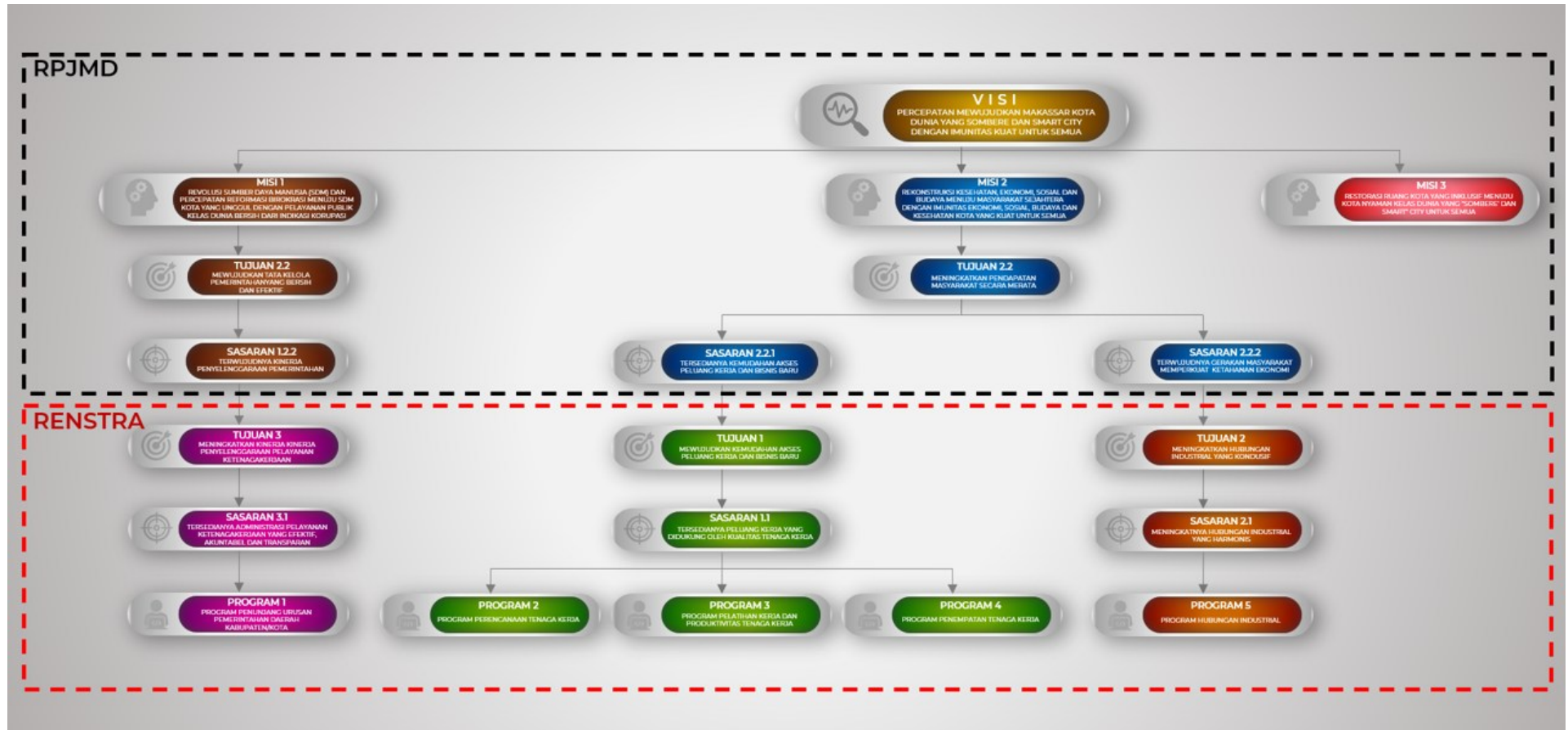
1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi;
2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua;
3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart” city untuk semua.

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan dimana untuk non urusan sesuai dengan misi pertama (1) “Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi

Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi”, pada tujuan 1.2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif pada sasaran 1.2.2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah. Sedangkan untuk urusan tenaga kerja sesuai dengan misi kedua (2) Kota Makassar “Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesehatan Kota yang Kuat Untuk Semua”, pada tujuan 2..2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata pada sasaran 2.2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru serta pada sasaran 2.2.2. Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi. Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada bagan berikut:



**GAMBAR 1**  
**CASCADING KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN KOTA MAKASSAR**



Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menetapkan beberapa kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif dan remuneratif perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
3. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja;
4. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
5. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
6. Memberikan pelayanan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
7. Memberikan pemahaman tentang Peraturan Ketenagakerjaan kepada pengusaha dan pekerja;
8. Mewujudkan sistem pengupahan yang adil;
9. Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi;
10. Peningkatan program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis teknis yang diimplementasikan dalam 4 (empat) urusan wajib yang dirumuskan berdasarkan:

1. Usulan Masyarakat melalui proses musrenbang dan forum SKPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar;

2. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026; dan
3. Rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian SDGs dalam pembangunan berkelanjutan
2. Pengentasan pengangguran;
3. Pencapaian target Sasaran 2 (dua) pada RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Makassar;
4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Perumusan program dan kegiatan bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Tahapan ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan bidang ketenagakerjaan maka dibuatlah program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan.

Langkah strategis itu mulai dari melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga mendapatkan pemagangan dan sertifikasi profesi/kompetensi.

Langkah strategis ke 2 (dua) melalui Program Penempatan Tenaga Kerja melalui pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja ataupun pekerja/buruh.

Langkah strategis ketiga, Dinas Ketenagakerjaan melalui Program Hubungan Industrial telah melakukan pendataan terutama perusahaan yang terdampak serta jumlah pekerja yang dirumahkan dan atau di PHK; pengawasan dan perlidungan terhadap pekerja sehingga di perlakukan secara adil oleh pemberi kerja melalui pelatihan kerja dan memperoleh pelatihan-pelatihan, membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK akibat Covid-19 dan meningkatkan layanan mediasi bila terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan.

Penyusunan program perangkat daerah disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program perangkat daerah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. 1.1**  
**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM DINAS KETENAGAKERJAAN**  
**KOTA MAKASSAR TAHUN 2024**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59,52%	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	52,50%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	96,77%
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	22,00%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,03%
							Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	22,00%
							Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	1.190 Orang
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	65,00%		
Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	9.555 Peluang Kerja							
Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	4,14%	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	4,14%	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	38,50%

							Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	3,66%
							Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	79,00%
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	46,00%	Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90,00%
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	80,00		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00%
							Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00%

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 direncanakan dalam 5 Program, 20 kegiatan dan 55 sub kegiatan;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2024, adalah : Rp.24.187.373.870-, (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dimana dari 16 (enam belas) usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar sebanyak 16 (enam belas) usulan kegiatan yang terakomodir;
4. Rumusan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD Tahun 2024 Kota Makassar;

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagaimana disajikan pada tabel 1.2 sesuai format T-C.33 Pemendagri 86 Tahun 2017 berikut :

**TABEL 1.2 (FORMAT T-C.33)**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**  
**KOTA MAKASSAR**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERRKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
02 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				24.553.916.761			21.236.462.000	
02 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	KOTA MAKASSAR	90 PERSEN	11.534.696.861	APBD		90 PERSEN	13.995.889.000
		PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		100 PERSEN				100 PERSEN	
		PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS		90 PERSEN				90 PERSEN	
02 07 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	12 Dokumen	71.310.300	APBD		14 Dokumen	301.090.846
02 07 01 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	2 Dokumen	43.153.000	APBD		3 Dokumen	141.880.522
02 07 01 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	5.377.000	APBD		1 Dokumen	10.160.239
02 07 01 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	3.839.400	APBD		1 Dokumen	9.531.126
02 07 01 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	2.429.800	APBD		1 Dokumen	9.504.603
02 07 01 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	1.763.800	APBD		1 Dokumen	8.315.804
02 07 01 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kota Makassar	4 Dokumen	5.286.300	APBD		5 Dokumen	112.455.400
02 07 01 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	2 Dokumen	3.383.000	APBD		2 Dokumen	8.643.152
02 07 01 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	48 Dokumen	8.560.610.161	APBD		48 Dokumen	9.711.834.564



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.07.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	61 Orang/Bulan	8.115.144.361	APBD		61 Orang/Bulan	9.243.744.266
02.07.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	12 Dokumen	265.320.000	APBD		12 Dokumen	273.839.508
02.07.01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	12 Dokumen	144.145.200	APBD		12 Dokumen	152.763.600
02.07.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	12 Laporan	36.000.000	APBD		12 Laporan	41.481.300
02.07.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Kota Makassar	12 Dokumen	126.524.400	APBD		12 Dokumen	148.894.946
02.07.01.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	12 Dokumen	27.578.400	APBD		12 Dokumen	85.944.024
02.07.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	12 Laporan	38.346.000	APBD		12 Laporan	62.350.322
02.07.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	12 Dokumen	356.946.000	APBD		12 Dokumen	366.053.597
02.07.01.05.02	Pengadaan Paksi Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Paksi Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Kota Makassar	0 Paket	0	APBD		110 Paket	31.303.500
02.07.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	12 Dokumen	38.346.000	APBD		12 Dokumen	63.265.072
02.07.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Makassar	37 Orang	258.000.000	APBD		20 Orang	180.000.000
02.07.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	0 Orang	0	APBD		50 Orang	31.473.025
02.07.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	Kota Makassar	7 Jenis	784.382.900	APBD		7 Jenis	1.305.877.434
02.07.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	1 Paket	13.312.800	APBD		1 Paket	13.321.455
02.07.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	5 Paket	75.377.200	APBD		5 Paket	85.039.088
02.07.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	2 Paket	76.827.300	APBD		3 Paket	73.753.231
02.07.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Makassar	2 Paket	22.665.600	APBD		2 Paket	40.808.600
02.07.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Makassar	12 Dokumen	26.100.000	APBD		12 Dokumen	20.475.000

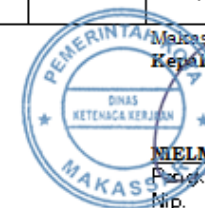
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02 07 01 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	12 Laporan	511.500.000	APBD		12 Laporan	694.300.000
02 07 01 06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kota Makassar	12 Dokumen	58.000.000	APBD		12 Dokumen	372.120.000
02 07 01 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan EMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	19 Unit	356.245.000	APBD		86 Unit	661.321.447
02 07 01 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Makassar	8 Unit	200.000.000	APBD		25 Unit	217.109.557
02 07 01 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar	11 Unit	156.245.000	APBD		60 Unit	344.211.830
02 07 01 07 08	Pengadaan Ases Tak Berwujud	Jumlah Unit Ases Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Makassar	0 Unit	0	APBD		1 Unit	100.000.000
02 07 01 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan EMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	36 Unit	692.054.500	APBD		36 Unit	750.214.662
02 07 01 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	12 Laporan	158.313.600	APBD		12 Laporan	43.939.488
02 07 01 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Makassar	12 Laporan	236.443.300	APBD		12 Laporan	372.126.014
02 07 01 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	12 Laporan	237.297.600	APBD		12 Laporan	328.083.160
02 07 01 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	74 Unit	586.623.600	APBD		49 Unit	750.601.504
02 07 01 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Makassar	1 Unit	44.380.000	APBD		1 Unit	53.468.140
02 07 01 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kota Makassar	17 Unit	247.957.600	APBD		16 Unit	393.186.143
02 07 01 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Makassar	55 Unit	36.950.000	APBD		30 Unit	52.174.650
02 07 01 09 08	Pemeliharaan Ases Tak Berwujud	Jumlah Ases Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Makassar	0 Unit	0	APBD		1 Unit	50.000.000
02 07 01 09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	Kota Makassar	1 Unit	257.336.000	APBD		1 Unit	201.772.571
02 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA	KOTA MAKASSAR	96,77 PERSEN	149.040.400	APBD		96,77 PERSEN	133.804.000
02 07 02 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	2 Dokumen	149.040.400	APBD		2 Dokumen	133.804.000
02 07 02 01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	1 Dokumen	111.507.200	APBD		1 Dokumen	36.346.952

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02 07 02 01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Kota Makassar	50 Perusahaan	37.533.200	APBD		50 Perusahaan	36.857.048
02 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA JUMLAH PESERTA PELATIHAN SKILL TRAINING GRATIS SEKTOR KETENAGAKERJAAN	KOTA MAKASSAR	1,03 PERSEN	3.698.283.800	APBD		1,10 PERSEN	4.234.446.000
22,00 PERSEN				22,50 PERSEN					
1.190 ORANG				1.230 ORANG					
02 07 03 01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	Kota Makassar	240 Orang	1.270.128.300	APBD		560 Orang	2.274.315.229
02 07 03 01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	Kota Makassar	240 Orang	1.261.615.300	APBD		560 Orang	2.073.746.445
02 07 03 01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kecepatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2024	Kota Makassar	50 Lembaga	8513.000	APBD		150 Lembaga	134.568.784
02 07 03 02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Makassar	80 Lembaga	34.813.400	APBD		80 Lembaga	101.276.124
02 07 03 02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Makassar	80 Lembaga	34.813.400	APBD		80 Lembaga	101.276.124
02 07 03 03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Makassar	12 Perizinan	214.774.300	APBD		24 Perizinan	260.468.527
02 07 03 03 01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Makassar	12 Perizinan	214.774.300	APBD		24 Perizinan	260.468.527
02 07 03 04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Makassar	90 Perusahaan	399.285.300	APBD		250 Perusahaan	454.354.794
02 07 03 04 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Makassar	90 Perusahaan	399.285.300	APBD		250 Perusahaan	454.354.794
02 07 03 05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Makassar	1 Dokumen	1.779.282.500	APBD		1 Dokumen	1.144.031.326
02 07 03 05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Makassar	1 Dokumen	1.773.282.500	APBD		1 Dokumen	1.144.031.326
02 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR JUMLAH PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU	KOTA MAKASSAR	65,00 PERSEN	1.803.790.600	APBD		75,00 PERSEN	1.901.789.000
9.555 PELUANG KERJA				10.100 PELUANG KERJA					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02 07 04 01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitas Layanan	Kota Makassar	3.873 Orang	1.436.120.600	APBD		4.383 Orang	1.015.922.491
02 07 04 01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Kota Makassar	0 Orang	0	APBD		30 Orang	13.375.542
02 07 04 01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kota Makassar	3.500 Orang	142.778.400	APBD		4.000 Orang	333.720.735
02 07 04 01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Makassar	0 Orang	0	APBD		100 Orang	42.307.631
02 07 04 01 04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kota Makassar	130 Orang	802.751.600	APBD		100 Orang	115.814.209
02 07 04 01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Penguatan Kelembutan Kerja	Kota Makassar	183 Orang	990.590.600	APBD		183 Orang	510.704.878
02 07 04 02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Kota Makassar	6 Lembaga	41.499.200	APBD		6 Lembaga	65.835.062
02 07 04 02 01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Kota Makassar	6 Lembaga	41.499.200	APBD		6 Lembaga	48.229.853
02 07 04 02 02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Kota Makassar	0 Lembaga	0	APBD		4 Lembaga	17.605.203
02 07 04 03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Makassar	8.000 Orang	104.094.800	APBD		8.000 Orang	605.711.307
02 07 04 03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	12 Dokumen	60.328.000	APBD		12 Dokumen	63.244.068
02 07 04 03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Makassar	8.000 Orang	43.766.800	APBD		8.000 Orang	139.965.222
02 07 04 03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	0 Orang	0	APBD		1.000 Orang	342.502.017
02 07 04 04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan	Kota Makassar	40 Orang	222.076.000	APBD		140 Orang	214.320.140
02 07 04 04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kota Makassar	0 Orang	0	APBD		100 Orang	111.836.306
02 07 04 04 03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kota Makassar	40 Orang	222.076.000	APBD		40 Orang	102.423.834

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN PERSENTASE KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	KOTA MAKASSAR	38,50 PERSEN 3,66 PERSEN 79,00 PERSEN	7.368.105.100	APBD		51,01 PERSEN 2,50 PERSEN 89,00 PERSEN	970.534.000
02 07 05 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Kota Makassar	105 Perusahaan	47.893.300	APBD		105 Perusahaan	274.220.715
02 07 05 01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WULKP Online	Kota Makassar	100 Perusahaan	1.024.800	APBD		100 Perusahaan	58.292.615
02 07 05 01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Makassar	5 Perusahaan	868.700	APBD		5 Perusahaan	27.558.575
02 07 05 01 03	Penyenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Makassar	12 Laporan	45.399.800	APBD		12 Laporan	188.369.525
02 07 05 02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	260 Perkara	7.320.211.800	APBD		260 Perkara	696.313.285
02 07 05 02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kota Makassar	60 Perkara	343.526.300	APBD		60 Perkara	128.068.697
02 07 05 02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terealisasi	Kota Makassar	200 Perkara	1.98.663.600	APBD		200 Perkara	230.562.246
02 07 05 02 03	Penyenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kota Makassar	12 Serikat Pekerja	3.861.200	APBD		Asosiasi dan 12 Serikat Pekerja	31.334.000
02 07 05 02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kota Makassar	2 Lembaga	250.299.300	APBD		2 Lembaga	220.603.005

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02 07 05 02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	35.782 Orang	6.517.861.400	APBD		150 Orang	85.745.338



Makassar, 20 Januari 2025  
Kepala Dinas Ketenagakerjaan

*Nelma Palamba*  
**NELMA PALAMBA, SH., M. AP.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda IV.c  
Nip. : 19651210 199112 2 001

## **BAB II**

# **PERBANDINGAN PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA-RENSTRA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR**

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2024 yang memuat Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 beserta rincian target kinerja capaian program yang akan di capai pada tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026.

Dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 untuk pembangunan bidang ketenagakerjaan tahun anggaran 2023 direncanakan dalam 5 program yang dijabarkan dalam 20 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 24.187.373.870-, (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Adapun perbandingan program/kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Ketenagakerjaan tahun anggaran 2024 sebagaimana terdapat pada tabel 2.1 dibawah ini :

**TABEL 2.1**  
**PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM RENJA DAN RENSTRA**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN**

KODE	URUSAN/EIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)		RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENJA TAHUN ANGGARAN 2024		RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENSTRA TAHUN ANGGARAN 2024		KESESUAIAN		
		RENJA	RENSTRA	K	Rp	K	Rp	YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERHAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
02	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
					24.149.826.170		19.133.413.800			
02	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90 PERSEN		90 PERSEN		
				PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100 PERSEN	10.568.489.220	100 PERSEN	11.015.158.400	
				PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	90 PERSEN		90 PERSEN		
02	07	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	90.461.600	14 Dokumen	262.911.000	
02	07	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	71.310.300	3 Dokumen	207.441.000	
02	07	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.377.000	1 Dokumen	10.394.000	
02	07	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.899.400	1 Dokumen	8.317.400	
02	07	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	1 Dokumen	2.429.800	1 Dokumen	5.124.400	
02	07	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD	1 Dokumen	1.769.800	1 Dokumen	5.124.400	
02	07	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	5.286.300	5 Dokumen	10.038.300	
02	07	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.589.000	2 Dokumen	6.471.500	
02	07	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	7.328.002.636	12 Bulan	7.218.824.616	
02	07	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	6.882.557.436	61 Orang/Bulan	6.175.544.516
02	07	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	265.320.000	12 Dokumen	263.280.000




KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)		RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENJA TAHUN ANGGARAN 2024		RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENSTRA TAHUN ANGGARAN 2024		KESESUAIAN	
		RENJA	RENSTRA	K	Rp	K	Rp	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
02.07.01.02.03	Penyusunan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	144.145.200	12 Dokumen	144.000.000		
02.07.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	36.000.000	12 Laporan	36.000.000		
02.07.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	181.681.200	12 Bulan	163.648.000		
02.07.01.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	82.735.200	12 Dokumen	82.728.800		
02.07.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	96.946.000	12 Laporan	79.819.200		
02.07.01.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	332.946.000	12 Bulan	446.639.600		
02.07.01.05.02	Pengadaan Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Paket	-	110 Paket	76.865.600		
02.07.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	98.946.000	12 Dokumen	99.774.000		
02.07.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	234.000.000	20 Orang	270.000.000		
02.07.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Orang	-	50 Orang	-		
02.07.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	7 Jenis	902.382.900	7 Jenis	1.311.160.800		
02.07.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.312.800	1 Paket	13.312.800		
02.07.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.977.200	5 Paket	98.828.800		
02.07.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	76.827.300	3 Paket	89.188.000		
02.07.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.665.600	2 Paket	43.731.200		
02.07.01.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	26.100.000	12 Dokumen	26.100.000		
02.07.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	483.500.000	12 Laporan	686.000.000		
02.07.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	12 Dokumen	204.000.000	12 Dokumen	354.000.000		
02.07.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	26 Unit	356.233.000	80 Unit	466.754.300		
02.07.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	226.000.000	30 Unit	167.511.600		
02.07.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	130.233.000	50 Unit	299.242.700		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT-COME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)		RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENJA TAHUN ANGGARAN 2024		RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENSTRA TAHUN ANGGARAN 2024		KESESUAIAN	
		RENJA	RENSTRA	K	Rp	K	Rp	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02 07 01 07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	- Unit	-	1 Unit	-		
02 07 01 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	732.942.884	36 Laporan	685.652.684		
02 07 01 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	158.313.600	12 Laporan	159.638.400		
02 07 01 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	337.331.684	12 Laporan	337.331.684		
02 07 01 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	237.297.600	12 Laporan	88.683.600		
02 07 01 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74 Unit	440.839.000	49 Unit	669.666.500		
02 07 01 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.380.000	1 Unit	37.614.000		
02 07 01 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	284.173.000	16 Unit	303.867.500		
02 07 01 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	36.950.000	30 Unit	36.950.000		
02 07 01 09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	- Unit	-	1 Unit	-		
02 07 01 09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	105.336.000	1 Unit	191.235.000		
02 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA	96,77 PERSEN	149.040.400	96,77 PERSEN	260.660.400		
02 07 02 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2 Dokumen	149.040.400	2 Dokumen	260.660.400		
02 07 02 01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	111.507.200	1 Dokumen	170.227.200		
02 07 02 01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	50 Perusahaan	37.533.200	50 Perusahaan	80.433.200		
02 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA JUMLAH PESERTA PELATIHAN SKILL TRAINING GRATIS SEKTOR KETENAGAKERJAAN	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA JUMLAH PESERTA PELATIHAN SKILL TRAINING GRATIS SEKTOR KETENAGAKERJAAN	1,03 PERSEN 22,00 PERSEN 1.190 ORANG	3.203.613.800	1,03 PERSEN 22,00 PERSEN 1.190 ORANG	4.676.914.600		
02 07 03 01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	676 Orang	1.132.128.300	676 Orang	2.188.903.700		
02 07 03 01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kesempilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	240 Orang	1.123.615.300	560 Orang	2.134.293.700		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)		RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENJA TAHUN ANGGARAN 2024		RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENSTRA TAHUN ANGGARAN 2024		KESESUAIAN	
		RENJA	RENSTRA	K	Rp	K	Rp	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
02 07 03 01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Infrastruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Infrastruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	50 Lembaga	8.513.000	150 Lembaga	54.610.000		
02 07 03 02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80 Lembaga	34.813.400	80 Lembaga	418.459.000		
02 07 03 02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80 Lembaga	34.813.400	80 Lembaga	418.459.000		
02 07 03 03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	12 Perizinan	214.774.300	24 Perizinan	194.667.700		
02 07 03 03 01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	12 Perizinan	214.774.300	24 Perizinan	194.667.700		
02 07 03 04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	90 Perusahaan	399.285.300	250 Perusahaan	894.321.300		
02 07 03 04 01	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	90 Perusahaan	399.285.300	250 Perusahaan	894.321.300		
02 07 03 06	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Kota	Jumlah pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Kota	1 Dokumen	1.422.612.500	1 Dokumen	980.562.900		
02 07 03 05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1.422.612.500	1 Dokumen	980.562.900		
02 07 04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR</b>	<b>PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR</b>	<b>66,00 PERSEN</b>	<b>2.389.181.350</b>	<b>66,00 PERSEN</b>	<b>1.921.317.600</b>		
		<b>JUMLAH PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU</b>	<b>JUMLAH PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU</b>	<b>9.656 PELUANG KERJA</b>		<b>9.656 PELUANG KERJA</b>			
02 07 04 01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan	3.713 Bulan	1.636.284.150	3.885 Bulan	980.634.700		
02 07 04 01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	- Orang	-	30 Orang	40.833.800		
02 07 04 01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3.500 Orang	144.946.400	3.500 Orang	183.631.400		
02 07 04 01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	- Orang	-	100 Orang	41.575.400		
02 07 04 01 04	Penyediaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30 Orang	235.120.000	100 Orang	278.612.000		
02 07 04 01 05	Peluncuran Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Peluncuran Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Peluncuran Kesempatan Kerja	183 Orang	1.256.217.750	183 Orang	435.882.100		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)		RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENJA TAHUN ANGGARAN 2024		RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENSTRA TAHUN ANGGARAN 2024		KESESUAIAN	
		RENJA	RENSTRA	K	Rp	K	Rp	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
02 07 04 02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Jumlah Pelayanan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	6 Lembaga	41.499.200	6 Lembaga	59.319.200		
02 07 04 02 01	Penyediaan Sumber Daya Perisinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perisinan LPTKS yang Terintegrasi	Jumlah Perisinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	41.499.200	6 Lembaga	41.830.400		
02 07 04 02 02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	- Lembaga	-	4 Lembaga	17.488.800		
02 07 04 03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Informasi Pasar Kerja	12 Bulan	489.322.000	12 Bulan	560.160.000		
02 07 04 03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	60.824.800	12 Dokumen	60.824.800		
02 07 04 03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4.000 Orang	43.766.800	8.000 Orang	104.096.000		
02 07 04 03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	500 Orang	385.227.200	1.000 Orang	385.227.200		
02 07 04 04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan	140 Orang	222.076.000	140 Orang	331.313.700		
02 07 04 04 01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	- Orang	-	100 Orang	40.511.700		
02 07 04 04 03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdasarkan	Jumlah PMI Purna yang Diberdasarkan	40 Orang	222.076.000	40 Orang	290.802.000		
02 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK	38,50 PERSEN	8.039.200.400	38,50 PERSEN	1.269.362.800		
02 07 05 01		ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN	ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN	3,66 PERSEN		3,66 PERSEN			
02 07 05 01 01		PERSENTASE KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	PERSENTASE KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	79,00 PERSEN		79,00 PERSEN			
02 07 05 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	106 Perusahaan	51.223.300	106 Perusahaan	105.830.100		
02 07 05 01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Perusahaan	1.024.800	100 Perusahaan	1.759.900		
02 07 05 01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerja sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	868.700	5 Perusahaan	1.596.500		
02 07 05 01 03	Penyusunan Peraturan dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartite) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartite) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartite) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	49.329.800	12 Laporan	102.473.700		

KODE	URUSAN/IBIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)		RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENJA TAHUN ANGGARAN 2024		RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENSTRA TAHUN ANGGARAN 2024		KESESUAIAN	
		RENJA	RENSTRA	K	Rp	K	Rp	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
02 07 05 02	Pencapaian dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencapaian dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencapaian dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	260 Perkara	7.987.977.100	260 Perkara	1.165.532.700		
02 07 05 02 01	Pencapaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	60 Perkara	77.126.300	60 Perkara	177.727.500		
02 07 05 02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	200 Perkara	198.663.600	200 Perkara	231.177.100		
02 07 05 02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non ASIAN	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan 13 Serikat Pekerja	9.861.200	Asosiasi dan 13 Serikat Pekerja	63.874.100		
02 07 05 02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	250.299.300	2 Lembaga	278.089.900		
02 07 05 02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35.782 Orang	7.452.026.700	150 Orang	412.664.100		

Makassar, 20 Januari 2025  
 Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
  
**NIENNA PALAMBA, SH., M. AP.**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda IV.c  
 Nip. : 19651210 199112 2 001

Dari tabel di atas terdapat perbedaan pagu anggaran antara Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Ketenagakerjaan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 5.053.960.070,- (lima milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh puluh rupiah) yang dialokasikan jaminan sosial bagi pekerja rentan dalam pengentasan kemiskinan ekstrim.

Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana dan tidak terlaksana antara Renja tahun 2024 dengan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

**Tabel. 2.2**  
**Analisis Perbandingan Program dan Kegiatan**  
**Antara Renja dan Rencana Strategis**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar TA.2024**

NO.	URAIAN	RENJA	RENSTRA	CATATAN
1.	Program	5	5	Sesuai
2.	Kegiatan	20	20	Sesuai
3.	Sub Kegiatan	60	55	Tidak Sesuai
4.	Anggaran	24.187.373.870	19.133.413.800	Tidak Sesuai

## **BAB III**

# **CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 dijadikan sebagai landasan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan.

Untuk mewujudkan “Ketenagakerjaan yang mandiri, berdaya saing, harmonis dan sejahtera untuk semua”, Dinas Ketenagakerjaan berupaya melaksanakannya dengan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Selama tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan telah melaksanakan 5 program dengan 20 kegiatan dan 55 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp.24.553.916.761,- (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.24.191.671.761,- (dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp.362.245.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 sebesar Rp.23.127.123.227,- (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 94,19 persen.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara melakukan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pasal 289) dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pasal 301).

### **3.1. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, dilakukan melalui pemantauan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Hasil pemantauan digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menggunakan Formulir E.75 Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana tertuang pada tabel 3.1 berikut:



**TABEL 3.1 (FORMAT E-75)**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KOTA MAKASSAR**

KABUPATEN/KOTA : KOTA MAKASSAR  
PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN  
PERIODE RENJA PERANGKAT DAERAH : TAHUN 2024

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI		RENCANA KINERJA TAHUN 2023				KESESUAIAN		EVALUASI	TINDAK LANJUT	
					TARGET CAPAIAN KINERJA		DANA						
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
		RENJA	DPA	RENJA	DPA	RENJA	DPA	RENJA	DPA	YA	TIDAK	(8)	(9)
02			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
02	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
							24.149.525.170	24.553.916.761					
02	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	KOTA MAKASSAR	KOTA MAKASSAR	90 PERSEN	90 PERSEN				
				PERSENTASE KE TERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE KE TERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH			100 PERSEN	100 PERSEN	10.368.489.220	11.534.696.861		
				PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS			90 PERSEN	90 PERSEN				
02	07	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	93.461.600	7.1310.300		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Dokumen	2 Dokumen	71.310.300	49.159.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	5.377.000	5.377.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	3.899.400	3.899.400		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	2.429.800	2.429.800		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	1.769.800	1.769.800		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	4 Dokumen	4 Dokumen	5.286.300	5.286.300		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Dokumen	2 Dokumen	3.389.000	3.389.000		
02	07	01	02	Admin Istirahat Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	7.328.002.636	8.560.610.161		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Kota Makassar	62 Orang/ Bulan	62 Orang/ Bulan	6.882.537.436	8.115.144.961		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	265.320.000	265.320.000		
				Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Pengadaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	144.145.200	144.145.200		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000	36.000.000		
02	07	01	03	Admin Istirahat Barang Milik Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	181.681.200	126.524.400		
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	82.735.200	27.578.400		
				Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pengadaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	98.946.000	98.946.000		
02	07	01	05	Admin Istirahat Kepegawaian	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	332.946.000	356.946.000		
				Pelaksanaan Pelaksanaan Dinas Beperantara Atribusi Kelempagaan	Jumlah Pelaksanaan Dinas Beperantara Atribusi Kelempagaan	Kota Makassar	Kota Makassar	- Piktet	- Piktet	-	-		

KODE	URUSAN/HIDANG URISAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA KINERJA TAHUN 2023						KESESUAIAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT
				TARGET CAPAIAN KINERJA		DANA						
				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
02.07.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Administrasi Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	98.946.000	98.946.000				
02.07.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Makassar	Kota Makassar	10 Orang	10 Orang	234.000.000	234.000.000				
02.07.01.05.11	Himbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Himbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Kota Makassar	- Orang	- Orang	-	-				
02.07.01.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Tersedia</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>902.382.900</b>	<b>784.382.900</b>				
02.07.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Pemasangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Pemasangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Paket	1 Paket	13.312.800	13.312.800				
02.07.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	5 Paket	5 Paket	75.977.200	75.977.200				
02.07.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Paket	2 Paket	76.827.300	76.827.300				
02.07.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Paket	2 Paket	22.665.600	22.665.600				
02.07.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	26.100.000	26.100.000				
02.07.01.06.09	Penyediaan Laporan Rapat Koordinasi dan Komunitas SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunitas SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	483.500.000	511.500.000				
02.07.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemertahan Herbas Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Pemertahan Herbas Elektronik	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	204.000.000	58.000.000				
02.07.01.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>25 Unit</b>	<b>25 Unit</b>	<b>356.233.000</b>	<b>356.245.000</b>				
02.07.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	16 Unit	16 Unit	226.000.000	200.000.000				
02.07.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	9 Unit	9 Unit	130.233.000	156.245.000				
02.07.01.07.06	Pengadaan Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	- Unit	- Unit	-	-				
02.07.01.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>732.942.884</b>	<b>692.054.500</b>				
02.07.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	158.313.600	158.313.600				
02.07.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	337.331.664	296.443.300				
02.07.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	237.297.600	237.297.600				
02.07.01.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>74 Unit</b>	<b>74 Unit</b>	<b>440.839.000</b>	<b>586.623.600</b>				
02.07.01.09.01	Pemeliharaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Unit	1 Unit	44.380.000	44.380.000				
02.07.01.09.02	Pemeliharaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Kota Makassar	Kota Makassar	17 Unit	17 Unit	254.173.000	247.957.600				
02.07.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Makassar	Kota Makassar	55 Unit	55 Unit	36.950.000	36.950.000				
02.07.01.09.06	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Makassar	Kota Makassar	- Unit	- Unit	-	-				
02.07.01.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Rehabilitasi	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Unit	1 Unit	105.336.000	257.536.000				
02.07.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGAJU KE RENCANA TENAGA KERJA</b>	<b>KOTA MAKASSAR</b>	<b>KOTA MAKASSAR</b>	<b>96,77 PERSEN</b>	<b>96,77 PERSEN</b>	<b>149.040.400</b>	<b>149.040.400</b>				
02.07.02.01	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>149.040.400</b>	<b>149.040.400</b>				
02.07.02.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	111.507.200	111.507.200				
02.07.02.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perencanaan yang Menyusun RTK Mikro	Kota Makassar	Kota Makassar	50 Perusahaan	50 Perusahaan	37.533.200	37.533.200				
02.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA</b>	<b>PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI</b>			<b>1,03 PERSEN</b>	<b>1,03 PERSEN</b>						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI		RENCANA KINERJA TAHUN 2023				KESESUAIAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	
					TARGET CAPAIAN KINERJA		DANA					
			(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	
KERJA			TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	KOTA MAKASSAR	KOTA MAKASSAR	22,00 PERSEN	22,00 PERSEN	3.203.613.800	3.698.283.800		
			JUMLAH PESERTA PELATIHAN SKILL TRAINING GRATIS SEKTOR KETENAGAKERJAAN	JUMLAH PESERTA PELATIHAN SKILL TRAINING GRATIS SEKTOR KETENAGAKERJAAN			1.190 ORANG	1.190 ORANG				
02	07	03	01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	676 Orang	676 Orang	1.132.128.300	1.270.128.300		
02	07	03	01	05	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan bagi Rencana Kerja bermitra dengan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	240 Orang	240 Orang	1.123.615.300	1.261.615.300		
02	07	03	01	02	Koordinasi Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruksi Kerja Sarana dan Peralatan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kewakafan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instansi dan Peningkatan Sarana Peralatan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	50 Lembaga	50 Lembaga	8.513.000	8.513.000		
02	07	03	02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80 Lembaga	80 Lembaga	34.813.400	34.813.400		
02	07	03	02	05	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80 Lembaga	80 Lembaga	34.813.400	34.813.400		
02	07	03	03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Pemasaran Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Pemasaran Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	12 Perizinan	12 Perizinan	214.774.300	214.774.300		
02	07	03	03	05	Penyediaan Sumber Daya Pemasaran Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Pemasaran Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	12 Perizinan	12 Perizinan	214.774.300	214.774.300		
02	07	03	04	Konsultasi dan Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi dan Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi dan Peningkatan Produktivitas	90 Perusahaan	90 Perusahaan	399.285.300	399.285.300		
02	07	03	04	05	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi dan Peningkatan Produktivitas	90 Perusahaan	90 Perusahaan	399.285.300	399.285.300		
02	07	03	05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Kota	Jumlah pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.422.612.500	1.779.282.500		
02	07	03	05	05	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.422.612.500	1.779.282.500		
02	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR	65,00 PERSEN	65,00 PERSEN	2.389.181.350	1.803.790.600		
02	07	04	01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitas Layanan	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitas Layanan	3.713 Bulan	3.713 Bulan	1.636.284.150	1.436.120.600		
02	07	04	01	05	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Ikhtisik dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	- Orang	- Orang	-	-		
02	07	04	01	02	Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan ASAD dan ASU	3.300 Orang	3.300 Orang	144.946.400	142.778.400		
02	07	04	01	03	Penyediaan dan Pengembangan Jabatan bagi Pekerja Kota	Jumlah Pekerja Kota yang Mendapatkan Penyaluran dan Pengembangan Jabatan	- Orang	- Orang	-	-		
02	07	04	01	04	Penyediaan sarana dan Prasarana	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30 Orang	30 Orang	235.120.000	302.751.600		
02	07	04	01	05	Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	883 Orang	883 Orang	1.256.217.750	990.590.600		
02	07	04	02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Jumlah Pelayanan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Jumlah Pelayanan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	6 Lembaga	6 Lembaga	41.499.200	41.499.200		
02	07	04	02	05	Penyediaan Sumber Daya Pemasaran LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	6 Lembaga	41.499.200	41.499.200		
02	07	04	02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	- Lembaga	- Lembaga	-	-		
02	07	04	03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Informasi Pasar Kerja	12 Bulan	12 Bulan	489.322.000	104.094.800		
02	07	04	03	05	Perencanaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	12 Dokumen	60.328.000	60.328.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA KINERJA TAHUN 2023				KESELUAIAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT					
				TARGET CAPAIAN KINERJA		DANA									
				(3)	(4)	(5)	(6)				(7)	(8)			
02	07	04	03	02	Penyayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pembina Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Garis II) II	Jumlah Pencari dan Pembina Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Garis II) II	Kota Makassar	Kota Makassar	4.000 Orang	4.000 Orang	43.766.800	43.766.800		
02	07	04	03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Kota Makassar	Kota Makassar	300 Orang	300 Orang	385.227.200	-		
02	07	04	04	04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan	Kota Makassar	Kota Makassar	140 Orang	140 Orang	222.076.000	222.076.000		
02	07	04	04	05	Peningkatan Pelindungan dan Kesejahteraan Cakupan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pelempa Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditanggungkan Komite lainnya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditanggungkan Komite lainnya	Kota Makassar	Kota Makassar	- Orang	- Orang	-	-		
02	07	04	04	05	Pembudayaan Pekerja Migran Indonesia Purna (Bumiputera)	Jumlah PMI Purna yang Dibudayakan	Jumlah PMI Purna yang Dibudayakan	Kota Makassar	Kota Makassar	40 Orang	40 Orang	222.076.000	222.076.000		
02	07	05			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENDESAKAKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK</b>	<b>PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENDESAKAKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK</b>	KOTA MAKASSAR	KOTA MAKASSAR	38,50 PERSEN	38,50 PERSEN	8.039.200.400	7.368.105.100		
				<b>ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN</b>	<b>ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN</b>	3,66 PERSEN	3,66 PERSEN								
				<b>PERSENTASE KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)</b>	<b>PERSENTASE KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)</b>	79,00 PERSEN	79,00 PERSEN								
02	07	05	01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang banyak Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Kota Makassar	Kota Makassar	105 Perusahaan	105 Perusahaan	51.223.300	47.893.300		
02	07	05	01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terdaftar dan gien Hubungan Industrial dan Terdaftar di WILKIP Online	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terdaftar dan gien Hubungan Industrial dan Terdaftar di WILKIP Online	Kota Makassar	Kota Makassar	100 Perusahaan	100 Perusahaan	1.024.800	1.024.800		
02	07	05	01	02	Pendaftaran Petajanan Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Makassar	Kota Makassar	5 Perusahaan	5 Perusahaan	868.700	868.700		
02	07	05	01	03	Penyenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sistem Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sama III (PPYPKH, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sama III (PPYPKH, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	49.329.800	45.949.800		
02	07	05	02	01	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	260 Perkara	260 Perkara	7.987.977.100	7.320.211.800		
02	07	05	02	01	Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berkaitan/Bertampek pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perkara Perselisihan yang Dicegah	Kota Makassar	Kota Makassar	60 Perkara	60 Perkara	77.126.300	343.526.300		
02	07	05	02	02	Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berkaitan/Bertampek pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Disediakan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	200 Perkara	200 Perkara	198.663.600	198.663.600		
02	07	05	02	03	Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berkaitan/Bertampek pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kota Makassar	Kota Makassar	Asosiasi dan 12 Serikat Pekerja	Asosiasi dan 12 Serikat Pekerja	9.861.200	9.861.200		
02	07	05	02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Lembaga	2 Lembaga	250.299.300	250.299.300		
02	07	05	02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	Kota Makassar	35.782 Orang	35.782 Orang	7.452.026.700	6.517.861.400		

### 3.2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada bidang ketenagakerjaan dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dapat ditingkatkan lebih efektif dan efisien.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 direncanakan dalam 5 Program yang dijabarkan dalam 20 Kegiatan dan 55 subkegiatan;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2024 adalah Rp.24.553.916.761,- (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah); dan
4. Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2024 sebesar Rp.23.127.123.227,- (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 94,19 persen.

Rata-rata capaian target kinerja 5 program tahun 2024 sebesar 99,93 persen atau berkinerja sangat tinggi ( $91 \leq 100\%$ ).

Adapun rata-rata capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Rata-Rata Capaian Kinerja Program Tahun 2024**

Program/Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90,00%	90,16%	100,18%
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00%	93,44%	103,83%
<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>			
Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	96,77%	100,00%	106,89%
<b>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>			
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,03%	1,40%	135,92%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	22,00%	24,06%	109,36%
Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	1.190 Orang	862,00 Orang	72,44%
<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>			
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	65,00%	63,01%	96,94%
Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	9.555 Peluang Kerja	7795 Peluang Kerja	81,58%
<b>Program Hubungan Industrial</b>			
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	38,50%	39,45%	102,47%
Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	3,66%	2,82%	122,85%
Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	79,00%	63,41%	80,27%

Adapun rincian capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut:

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	91,92%	90,00%	90,16%	100,18%
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	68,25%	90,00%	93,44%	103,83%

Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut:

- a. Dari target 90 persen Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik terealisasi sebesar 90,16 persen atau dengan capaian sebesar 100,18 persen. Dimana dari 61 unit sarana dan prasarana aparatur lingkup Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 55 sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- b. Dari target 100 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 100,00 persen dimana dari 12 laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebanyak 12 laporan; dan
- c. Dari target 90 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, terealisasi sebesar 93,44 persen atau dengan capaian sebesar 103,83 persen. Dimana dari 61 ASN Lingkup Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 57 ASN mendapatkan peningkatan kapasitas.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.11.534.696.861,- (sebelas milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.841.500.863,- (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar 93,99 persen.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No.25 Tahun 2009). Intinya pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta



aparaturnya kepada stakeholder dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan stakeholder sekaligus memberikan kepuasan kepada stakeholder yang dilayani.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada stakeholder, sudah tentu suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh stakeholder yang membutuhkannya. Artinya jangan ada “tebang pilih” dalam pelaksanaannya dan yang paling penting lagi adalah bagaimana stakeholder dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Oleh karena itulah, Dinas Ketenagakerjaan dalam pencapaian sasaran tersebut melakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada stakeholder yang menerimanya meliputi :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai terkait masalah attitude atau perilaku;
- b. Menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik salah satunya dengan Menyusun SOP dan Peta Proses Bisnis;
- c. Meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik melalui pengadaan/perbaikakan sarana dan prasarana, penyediaan fasilitas untuk difabel, dan ruang laktasi; serta



d. Penyediaan sarana pengaduan.

Adapun perbaikan secara internal dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu melalui rapat koordinasi untuk membahas program kerja, permasalahan dan solusi pemecahan. Selain itu keterlibatan pimpinan tertinggi secara langsung dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Melakukan evaluasi kinerja pegawai setiap triwulannya.

**Faktor Penghambat:**

Dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja diuraikan sebagai berikut :

- a. Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang dalam rangka pemenuhan kebutuhan unit kerja.

**Faktor Pendukung:**

Dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

- a. Ketersediaan anggaran;  
b. Komitmen pimpinan dan ASN Lingkup Dinas Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan.

**Tindak Lanjut:**

Tindak Lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- a. Peningkatan kapasitas aparatur untuk menunjang penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan.

## 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun	93,33%	96,77%	100,00%	106,89%

Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut :

- a. Dari target 96,77 persen Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja terealisasi sebesar 100 persen. Dimana dari 11 kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Makassar yang

mengacu pada Rencana Tenaga Kerja (RTK) terealisasi sebanyak 11 kegiatan yang dilaksanakan.

Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.149.040.400,- (seratus empat puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.122.217.815,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau sebesar 82,00 persen.

**Faktor Penghambat :**

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja diuraikan sebagai berikut:

- a. Masih minimnya kesadaran perusahaan dalam menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro.

**Faktor Pendukung :**

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja diuraikan sebagai berikut :

- a. Telah tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Makassar Tahun 2022-2026;
- b. Terbentuknya Forum HRD.

**Tindak Lanjut :**

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- a. Lebih melibatkan Forum HRD yang sudah di bentuk dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro;
- b. Sosialisai Kebijakan yang tertuang Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Makassar tahun 2022-2026.

**3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,65%	1,03%	1,40%	135,92%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	20,05%	22,00%	24,06%	109,36%
Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan	962,00 Orang	1.190 Orang	862,00 Orang	72,44%

Dimana target capaian kinerja program sebagai berikut:

- a. Dari target 1,03 persen Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi terealisasi sebesar 1,40 persen atau dengan capaian sebesar 135,92 persen, dimana sebanyak 8.782 orang tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari 629.183 orang tenaga kerja keseluruhan;
- b. Dari target 22,00 persen Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 24,06 persen atau dengan capaian sebesar 109,36 persen, dimana PDRB dengan harga konstan sebesar Rp.140.197,90 (dalam milyar rupiah) dari 582.708 jiwa tenaga kerja persen; dan
- c. Dari target 1.190 Orang Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan terealisasi sebanyak 862 orang atau dengan capaian sebesar 72,44 persen.

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.3.698.283.800,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.615.917.040,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat puluh rupiah) atau sebesar 97,77 persen.

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja program ini antara lain:

- a. Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja;
- b. Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar.

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan indikator tersebut antara lain adanya Program Strategis Wali Kota “10.000 Skill Training Gratis” dengan memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan pengembangan produktivitas. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan serta dunia usaha. Akan semakin dipertajam dengan mengirim tenaga magang keluar negeri dan pelatihan bahasa asing. Peserta magang akan melalui proses tes kelayakan di

Jakarta, baik tes kompetensi, produktifitas, keterampilan, kesehatan dan penguasaan bahasa asing. Pelatihan dan Sertifikasi ini di harapkan menjadi salah satu upaya mendorong daya saing tenaga kerja lokal sebelum masuk ke dunia kerja.

Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar lebih mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja.



Pencapaian kinerja di atas juga didorong oleh terbentuknya Forum Skill Development Center (SDC) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dimana Forum SDC bertujuan untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan bekal pelatihan kepada tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu juga menjaring perusahaan industri untuk terlibat secara langsung dalam hal penempatan tenaga kerja. Selain itu adanya kerjasama dengan Asean Development Bank (ADB) terkait Job Start dengan memberikan pelatihan hard dan soft skill ke pada pencari kerja.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya, akan akan lebih mendorong LPK (Swasta) binaan untuk memiliki akreditasi, bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK)

Kementerian Ketenagakerjaan dan mengirim ASN untuk mengikuti diklat Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

#### Tindak Lanjut :

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

1. Melakukan evaluasi pelatihan, dilakukan setelah pelatihan selesai dilaksanakan untuk evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan;
2. Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan;
3. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;
4. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pemerintah pusat-daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihak pengguna; dan
5. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh LSP.

#### 4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	59,04%	65,00%	63,01%	96,94
Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	8.563 Peluang Kerja	9.555 Peluang Kerja	7795 Peluang Kerja	81,58

Dimana target capaian kinerja program sebagai berikut:

- a. Dari target 65 persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar terealisasi sebesar 63,01 persen atau dengan capaian sebesar 96,94 persen. Dimana dari 3.758 orang pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 2.368 orang; dan

- b. Dari target 9.555 peluang kerja dan bisnis baru terealisasi sebesar 7.795 peluang kerja atau dengan capaian sebesar 81,58 persen.

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.1.803.790.600,- (satu milyar delapan ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.553.795.169,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 86,14 persen.

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja program ini antara lain :

- a. Dalam penempatan tenaga kerja belum dilaksanakan secara optimal karena masih kurangnya PNS penjabat fungsional pengantar kerja;
- b. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal dan Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal; dan
- c. Masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya Pencari kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila telah diterima bekerja.

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan indikator tersebut, Dinas Ketenagakerjaan telah beberapa kali menggelar kegiatan kegiatan yang bertujuan meningkatkan serapan penempatan seperti job fair yang telah banyak bekerja sama dengan instansi atau perusahaan di Kota Makassar, pengembangan jejaring informasi pasar kerja, pembentukan bursa Kerja khusus (BKK) yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta dan Universitas, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Ketenagakerjaan. BKK merupakan wadah dalam mempertemukan alumni dengan pencari kerja, sebagai

wadah dalam memberikan pelatihan tamatan sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Beberapa upaya lain yang dilakukan melalui dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan pembinaan kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). Selain itu melalui peningkatan pelatihan yang berkaitan dengan pengenalan terhadap teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, serta berbagai keterampilan pendukung lainnya sehingga tenaga kerja mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Pencapaian kinerja peningkatan kesempatan kerja juga ditunjang oleh terbentuknya Forum Human Resources Development (HRD) dari sejumlah perusahaan swasta yang berada di Kota Makassar.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya, akan membentuk regulasi tentang Wajib Laport Lowongan Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 yang menyatakan “Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya”. Selain itu akan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja, serta penambahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

## 5. Program Hubungan Industrial

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	31,53%	38,50%	39,45%	102,47%
Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	4,21%	3,66%	2,82%	122,85%
Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	62,96%	79,00%	63,41%	80,27%

Dimana capaian kinerja program sebagai berikut:

- a. Dari target 38,50 persen Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak terealisasi sebesar 39,45 persen atau dengan capaian sebesar 102,47 persen. Dimana dari 2.299 perusahaan yang memiliki tenaga kerja melebihi 10 orang yang berada di Kota Makassar sebanyak 907 perusahaan telah menerapkan tata kelola kerja yang layak (Memiliki PP/PKB. Peserta BPJS dan LKS Tripartit);
- b. Dari target 3,66 persen Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun terealisasi 2,82 persen atau dengan capaian sebesar 122,85 persen. Perlu diketahui indikator ini bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Dimana sebanyak 164 kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan dari dari 5.808 perusahaan; dan
- c. Dari target 79 Persen Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) terealisasi sebesar 63,41 persen atau dengan capaian sebesar 80,27 persen. Dimana dari 614 kasus yang dilaporkan sebanyak 104 kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).

Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.7.368.105.100,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus lima ribu seratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.993.692.340,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 94,92 persen.

Hubungan industrial yang harmonis mendorong terciptanya ketenangan berusaha dan bekerja, peningkatan produksi dan produktivitas kerja serta keterampilan tenaga kerja. Hubungan industrial yang baik akan mempermudah setiap pihak mencapai tujuannya. Peningkatan hubungan industrial juga berdampak pada perkembangan perusahaan yang akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Yang tentunya ini akan membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Hubungan



industrial yang kondusif akan mendorong terciptanya stabilitas di sektor kerja dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pada keadaan tertentu kepentingan di antara keduanya dapat berbeda, hal ini berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, sarana sarana hubungan industrial sangat diperlukan agar tercipta iklim kerja yang harmonis.

Dinas Ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial melakukan pembinaan antara lain Serikat Pekerja/Serikat Buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartite dan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan.

Selain itu melakukan pendaftaran dan pemantaun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam menjamin kesejahteraan pekerja melakukan pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) melalui Dewan Pengupahan.

Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara tertulis dituangkan dalam perjanjian kerja tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya salah satu atau kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dan atau tidak memenuhi haknya. Dengan tidak dipenuhinya hak atau kewajiban tersebut, dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Semua perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit yakni hanya antara kedua belah pihak. Apabila perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak yang sedang berselisih mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan ditawarkan kepada pihak yang berselisih untuk meyelesaikan alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Apabila para pihak tersebut memutuskan untuk memilih alternatif mediasi maka penyelesaian perselisihan tersebut dilimpahkan kepada mediator Dinas Ketenagakerjaan dan untuk segera dilaksanakan mediasi. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Makassar.

**Faktor Penghambat :**

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Hubungan Industrial tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Tingginya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran menyebabkan angka sengketa hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja masih tinggi;
2. Selain itu, dalam penyelesaian kasus hubungan industrial terjadi peningkatan dengan anjuran (tidak terjadi kesepakatan antara perusahaan dan pekerja yang bersengketa) sehingga kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mengalami penurunan; dan
3. Masih terbatasnya PNS penjabat fungsional mediator.

**Faktor Pendukung :**

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Hubungan Industrial tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Terbentuknya LKS Tripartit yang setiap bulan melakukan rapat kerja terkait isu-isu Ketenagakerjaan;
2. Terbentuknya Dewan Pengupahan.

**Tindak Lanjut :**

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

1. Mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya;
2. Penambahan Pejabat Fungsional Mediator.

Sedangkan target dan realisasi anggaran per program yang telah dicapai di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Rincian Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2024**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.534.696.861	10.841.500.863	93,99%
2	Perencanaan Tenaga Kerja	149.040.400	122.217.815	82,00%
3	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.698.283.800	3.615.917.040	97,77%
4	Penempatan Tenaga Kerja	1.803.790.600	1.553.795.169	86,14%
5	Hubungan Industrial	7.368.105.100	6.993.692.340	94,92%
<b>TOTAL</b>		<b>24.553.916.761</b>	<b>23.127.123.227</b>	<b>94,19%</b>

Untuk lebih lengkapnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4 sesuai format Formulir Tabel E.81 Permendagri 86 Tahun 2017 di bawah ini :







### 3.3. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan WaliKota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2024 sampai tahun 2026 beserta rincian target kinerja capaian program yang akan di capai pada tahun 2026.

Evaluasi Hasil Pencapaian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk mengetahui capaian realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target akhir periode (tahun 2026).

Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, maka capaian rata-rata capaian program pada tahun 2024 adalah sebesar 88,14% atau dalam kategori tinggi.

Untuk lebih lengkapnya Evaluasi Hasil Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 sesuai format Formulir Tabel E.80 Permendagri 86 Tahun 2017 di bawah ini :





### 3.4. Evaluasi Terhadap Hasil Capaian Program Strategis RPJMD Kota Makassar

Dalam mewujudkan “Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi”, implementasi dalam pencapaian Program Strategis Walikota dan Wakil Walikota Makassar “**10.000 Skill Training Gratis**” dengan didukung oleh 2 (dua) Program, 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan berupa antara lain Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Pelatihan Bahasa Asing, Sertifikasi Kompetensi, Pelatihan Keterampilan bagi Tenaga Kerja Disabilitas, Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri dan Pelatihan Keterampilan bagi Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

Dinas Ketenagakerjaan selama Periode 2022 s.d 2026 menargetkan sebanyak 5.690 skill training gratis. Sampai dengan tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 3.329 orang mendapatkan skill training gratis atau dengan capaian sebesar 58,51 persen.

Adapun rincian capaian dari masing-masing sub kegiatan sebagaimana tertuang pada table berikut:

**Tabel 3.6**  
**Capaian Program Strategis 10.000 Skill Training Gratis**  
**Periode Tahun 2022 s.d Tahun 2024**

<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>870</b>	<b>810</b>	<b>980</b>	<b>1020</b>	<b>1000</b>	<b>4680</b>	<b>1124</b>	<b>585</b>	<b>782</b>	<b>2491</b>	<b>93,65</b>	<b>53,23</b>	
<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>2600</b>	<b>534</b>	<b>336</b>	<b>240</b>	<b>1110</b>	<b>71,15</b>	<b>42,69</b>	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	520	520	520	520	520	2600	534	336	240	1110	71,15	42,69	Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
<b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>250</b>	<b>140</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>200</b>	<b>133,33</b>	<b>80,00</b>	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	50	40	60	60	40	250	140	20	40	200	133,33	80,00	Pelatihan Bahasa Asing
<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>400</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>1830</b>	<b>450</b>	<b>229</b>	<b>502</b>	<b>1181</b>	<b>124,32</b>	<b>64,54</b>	
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	300	250	400	440	440	1830	450	229	502	1181	124,32	64,54	Sertifikasi Kompetensi
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>1010</b>	<b>190</b>	<b>288</b>	<b>170</b>	<b>648</b>	<b>109,83</b>	<b>64,16</b>	
<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>810</b>	<b>150</b>	<b>248</b>	<b>130</b>	<b>528</b>	<b>112,34</b>	<b>65,19</b>	
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	0	0	20	20	20	60	0	0	60	60	300,00	100,00	Pelatihan Keterampilan bagi Tenaga Kerja Disabilitas
Perluasan Kesempatan Kerja	150	150	150	150	150	750	150	248	70	468	104,00	62,40	Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri
<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>200</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>120</b>	<b>100,00</b>	<b>60,00</b>	
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	40	40	40	40	40	200	40	40	40	120	100,00	60,00	Pelatihan Keterampilan bagi Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
<b>KERJASAMA DENGAN JOB START INDONESIA &amp; ADB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>66</b>	<b>36</b>	<b>190</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0	0	0	0	0	0	88	66	36	190	0,00	0,00	
<b>JUMLAH</b>	<b>1060</b>	<b>1000</b>	<b>1190</b>	<b>1230</b>	<b>1210</b>	<b>5690</b>	<b>1402</b>	<b>939</b>	<b>988</b>	<b>3329</b>	<b>102,43</b>	<b>58,51</b>	

Sedangkan dalam mewujudkan “Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota yang Kuat untuk Semua”, implementasi dalam pencapaian Program Strategis **Penyediaan Dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru** dengan didukung oleh 6 (enam) Perangkat Daerah yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada tahun 2022 di targetkan sebanyak 37.508 kemudahan akses peluang kerja/bisnis baru dengan anggaran sebesar Rp.24.832.397.380,- (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Realisasi dari pelaksanaan kemudahan akses peluang kerja/bisnis baru sebanyak 44.785 kemudahan akses peluang kerja/bisnis atau dengan capaian sebesar 119,40 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp.17.833.793.029,- (tujuh belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah).

Adapun rincian capaian dari masing-masing perangkat daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Capaian Program Strategis Penyediaan Dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru**  
**Periode 2022-2024**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA						REALISASI KINERJA				CAPAIAN S.D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP KONDISI AKHIR	
	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL	2022	2023	2024	TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	870	810	980	1020	1000	4680	1124	585	782	2491	93,65	53,23	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	520	520	520	520	520	2600	534	336	240	1110	71,15	42,69	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	520	520	520	520	520	2600	534	336	240	1110	71,15	42,69	Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	50	40	60	60	40	250	140	20	40	200	133,33	80,00	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	50	40	60	60	40	250	140	20	40	200	133,33	80,00	Pelatihan Bahasa Asing
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300	250	400	440	440	1830	450	229	502	1181	124,32	64,54	
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	300	250	400	440	440	1830	450	229	502	1181	124,32	64,54	Sertifikasi Kompetensi
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	7330	7830	8575	8725	9100	41560	278	354	6574	7206	30,36	17,34	
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2750	2750	2770	2770	2770	13810	150	248	2498	2896	35,02	20,97	
Pelayanan antar Kerja	2500	2500	2500	2500	2500	12500			2368	2368	31,57	18,94	Penempatan Tenaga Kerja
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	100	100	100	100	100	500			0	0	0,00	0,00	Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	0	0	20	20	20	60	0	0	60	60	300,00	100,00	Pelatihan Keterampilan bagi Tenaga Kerja Disabilitas
Perluasan Kesempatan Kerja	150	150	150	150	150	750	150	248	70	468	104,00	62,40	Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200	200	200	200	200	1000	0	0	242	242	40,33	24,20	
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	200	200	200	200	200	1000			242	242	40,33	24,20	Penempatan outsourcing
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	4240	4740	5465	5615	5990	26050	0	0	3758	3758	26,02	14,43	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA						REALISASI KINERJA				CAPAIAN S.D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP KONDISI AKHIR	
	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL	2022	2023	2024	TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	3740	4240	4965	5115	5490	23550			3758	3758	29,03	15,96	Informasi Pasar Kerja Online
Job Fair/Bursa Kerja	500	500	500	500	500	2500			0	0			Penempatan Tenaga Kerja
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	140	140	140	140	140	700	40	40	40	120	28,57	17,14	
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100	100	100	100	100	500			0	0	0,00	0,00	Pelatihan Keterampilan bagi Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	40	40	40	40	40	200	40	40	40	120	100,00	60,00	Pelatihan Keterampilan bagi Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
<b>KERJASAMA DENGAN JOB START INDONESIA &amp; ADB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>66</b>	<b>36</b>	<b>190</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0	0	0	0	0	0	88	66	36	190	0,00	0,00	
<b>JUMLAH</b>	<b>8200</b>	<b>8640</b>	<b>9555</b>	<b>9745</b>	<b>10100</b>	<b>46240</b>	<b>1490</b>	<b>1005</b>	<b>7392</b>	<b>9887</b>	<b>37,46</b>	<b>21,38</b>	

## BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI

Realisasi anggaran dan kinerja program Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar telah berjalan sesuai program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024. Namun dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu dilakukan review terhadap program/kegiatan untuk perbaikan pada tahun berikutnya, baik dari faktor yang mendorong tercapainya kinerja program, faktor yang menghambat terlaksananya program/kegiatan maupun tindak lanjut yang akan dilakukan untuk kedepannya hingga semua program/kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja program yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja dan Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
2. Masih terbatasnya PNS Penjabat Fungsional Pengantar Kerja dan Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial;
3. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal;
4. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda dan berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal; serta
5. Masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya Pencari kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila telah diterima bekerja.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya antara lain:

1. Akan membentuk regulasi tentang Wajib Laport Lowongan Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 yang menyatakan “Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap

- ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya”;
2. Akan lebih mendorong keberlangsungannya Forum SDC dan akan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan Penempatan Tenaga kerja;
  3. Mendorong swasta mengadakan atau membuat lembaga-lembaga pelatihan, menyiapkan standarisasi dan penerbitan sertifikat;
  4. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;
  5. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pemerintah pusat-daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihak pengguna;
  6. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh LSP;
  7. Mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya;
  8. Serta penambahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dan Pejabat Fungsional Mediator.

## BAB V P E N U T U P

### 5.1. Kesimpulan

Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024 mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2024 yang berpedoman pada RKPD Kota Makassar.

Dari alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp.24.553.916.761,- (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.24.191.671.761,- (dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp.362.245.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp.23.127.123.227,- (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 94,19 persen.

Adapun capaian masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.11.534.696.861,- (sebelas milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.841.500.863,- (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar 93,99 persen;
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.149.040.400,- (seratus empat puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.122.217.815,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau sebesar 82,00 persen;



3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.3.698.283.800,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.615.917.040,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat puluh rupiah) atau sebesar 97,77 persen;
4. Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.1.803.790.600,- (satu milyar delapan ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.553.795.169,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 86,14 persen; dan
5. Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.7.368.105.100,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus lima ribu seratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.993.692.340,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 94,92 persen.

## 5.2. Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi ditahun 2024 perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja melalui koordinasi internal Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;

2. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
3. Peningkatan mutu pelayanan melalui pemberian kesempatan yang lebih luas dalam mengikuti Diklat.

Makassar, 20 Januari 2025  
Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Makassar

**NIELMA PALAMBA, SH. M.AP**  
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. :19651210 199112 2 006